

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU TEMPE

DI KABUPATEN WAJO

TESIS (S-2)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

ANDI REWO BATARI WANTI

E062201008

MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH



PROGRAM PASCA SARJANA S – 2

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU TEMPE
DI KABUPATEN WAJO**

Disusun Oleh :

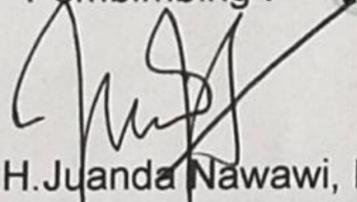
ANDI REWO BATARI WANTI

E062201008

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan.

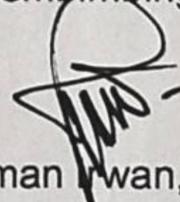
Menyetujui,

Pembimbing I



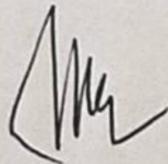
Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si
NIP. 19570818 198403 1 002

Pembimbing II



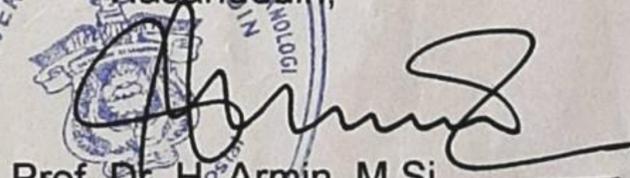
Dr. A. Lukman Iwan, S.IP, M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan,



Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198202 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si
NIP. 19551109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Rewo Batari Wanti

NIM : E062201008

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2022

Yang menyatakan,



Andi Rewo Batari Wanti



ABSTRAK

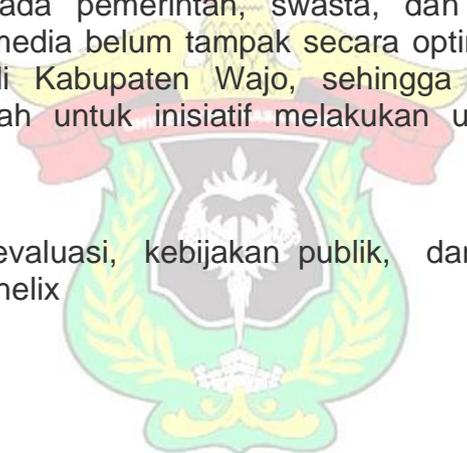
ANDI REWO BATARI WANTI : EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU TEMPE DI KABUPATEN WAJO (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan A.Lukman Irwan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pengelolaan Danau Tempe dalam kerangka *penta helix* dan faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan kajian literatur dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan Danau Tempe. Data dianalisis dengan teknik analisis argumentasi dan analisis brainstorming sesuai dengan teori Evaluasi William N.Dunn. Penyajian data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka *penta helix* secara structural memenuhi indikator stakeholder, namun kolaborasi yang terjadi hanya sampai pada pemerintah, swasta, dan universitas. Pelibatan masyarakat dan media belum tampak secara optimal dalam pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo, sehingga membutuhkan inisiatif Pemerintah Daerah untuk inisiatif melakukan upaya sinergitas antar-*stakeholder*.

Kata Kunci : evaluasi, kebijakan publik, danau tempe, kebijakan lingkungan, pentahelix



ABSTRACT

ANDI REWO BATARI WANTI : *The Evaluation Of Tempe Lake Management At Wajo Regency* (supervised by Juanda Nawawi and A. Lukman Irwan)

The research aims to critically analyze Tempe Lake management policy using penta helix framework and the factors affecting its management.

The research uses a qualitative approach, carried out a literature study and in-depth interviews with the authorities in Tempe Lake management, Data were analyzed using argumentative analysis and brainstorming analysis techniques in line William N. Dunn's evaluation theory. The data presentation was conducted descriptively. .

The research result indicates that penta helix framework structurally meets the stakeholder indicators, however, the collaboration occurring only reaches the government, private sector, and universities. The involvement of the community and the media has not appeared optimally in Tempe Lake management at Wajo Regency, so it requires the Regional Government's initiative to make efforts to synergise among stakeholders.

Keywords: evaluation, public policy, tempe lake, environmental policy, pentahelix

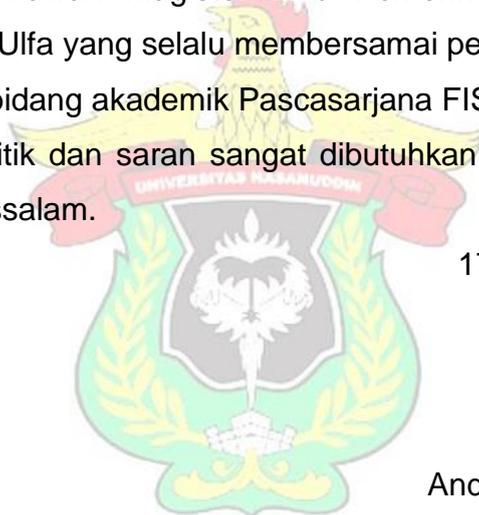


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan kasih-Nya sehingga Tesis yang berjudul, “**Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo**”, terselesaikan sesuai dengan rencana penulis. Pencapaian ini tidak terlepas dari kontribusi banyak orang sehingga pada lembar tesis ini saya berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Pemerintahan Daerah Pasca Sarjana S-2 Universitas Hasanuddin sekaligus ibu di kampus.
4. Dosen Pembimbing yaitu Prof. Juanda Nawawi, M.Si dan Dr. A.Lukman Irwan, M.Si yang senantiasa bersabar dalam mendidik penulis.
5. Dr. A. Muhammad Rusli, M.si, dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Dosen Penguji yang selalu memberi kritik dan saran membangun bagi penulis.
6. Almarhum Kakek Tercinta, Andi Syamsul Bahri Bintang yang telah menuntun penulis menempuh Pendidikan Tinggi dan Nenek Tercinta, Mardiana Daeng Mallibureng yang telah mengajarkan penulis tentang kesabaran dan ketekunan.
7. Ayah Tercinta, Andi Rudy Syam Bintang, Ibu Tercinta yang melahirkan penulis yaitu Arjuniarelo Daeng Mansi, dan Ibu Tercinta yaitu, Drs. Andi Mammi Kertabuana.
8. Ayah Mertua Tercinta, Muhammad Azis, S.Pd, MH dan Ibu Mertua Tercinta, Sahriah, S.Pd
9. Teman Hidup Tercinta, Aslam Azis.

10. Paman dan Bibi Penulis, Andi Dedy Syam Bintang, Andi Besse Rampe Gading, Baso Rahman, dan Andi Juwita Sari
11. Adik – adik penulis, Andi Baso Hidayat, Andi Sri Dywa Bintang, Andi Yustika Ratu, Andi Adinda Thalya Putri, Andi Massarani, Andi Yuliani, Nur Fadilah Azis, dan Ifkar Al-Haq
12. Guru kehidupan, Bang Nevy James, Pung Nawa, Pung Bau Lapatau, Kak Arwan, dan Kak Amma
13. Kawan seperjuangan, Eva, Jessica, Riska, Kak Ela, Roel, Hasyim, Umma, Edil, Fatima, Kak Dedy, Andi Wisnu, Sandro, Eky, Wahyu, Fadil, Wiwi, Sasa, Ai dan seluruh anggota Sekolah Rakyat, Walennae Documentary, FISS maupun Hama Kebun Garcof.
14. Kawan – kawan Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, terkhusus Ulfa yang selalu kebersamai pengurusan tesis ini.
15. Segenap bidang akademik Pascasarjana FISIP Unhas
Sekian, kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam pengembangan karya ini. Wassalam.



17 Januari 2021

Penulis,

Andi Rewo Batari Wanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR...	viii
DAFTAR TABEL...	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Kebijakan	8
2.2 Analisis Kebijakan Publik	9
2.3 Konsep Evaluasi Kebijakan	14
2.4 Paradigma Kritis	19
2.5 Konsep <i>Penta Helix</i>	21
2.6 Dasar Hukum Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe	22
2.7 Kerangka Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Tipe Penelitian	28
3.3 Sumber Data	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Fokus Penelitian	33

3.7 Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Danau Tempe	36
4.2 Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo dalam Kerangka <i>Penta Helix</i>	49
4.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Danau Tempe dalam Kerangka <i>Penta Helix</i>	104
4.4 Hasil Evaluasi Kebijakan Dimensi Penilaian	113
4.5 Hasil Evaluasi Kebijakan Dimensi Monitoring	116
4.6 Hasil Evaluasi Kebijakan Dimensi Pelaksanaan	117
PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 0.2 Hasil Penyusunan Daya Tampung Pencemaran Danau, BLHK, 2013	36
Gambar 0.3 Peta Administrasi Kecamatan Daerah Tangkapan Air Danau Tempe Kabupaten Wajo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS Jeneberang Saddang, 2018	37
Gambar 0.4 Peta Tutupan Lahan DTA Danau Tempe, BPKH, 2018	38
Gambar 0.5 Peta Lahan Kritis DTA Danau Tempe BPDASHL Jeneberang – Saddang, 2018	43
Gambar 0.6 Peta Erosi DTA Danau Tempe BPDASHL, 2018	47
Gambar 0.7 Tabel Tingkat Bahaya Erosi di DTA Danau Tempe, 2018	48
Gambar 0.8 Kualitas Air, BPDASHL Jeneberang Saddang, 2018	49
Gambar 0.9 Masterplan Kawasan Danau Tempe, 2016	63
Gambar 0.10 Masterplan Kawasan Danau Tempe, 2016	64
Gambar 0.11 Masterplan Kawasan Danau Tempe, 2016	64
Gambar 0.12 Masterplan Kawasan Danau Tempe, 2016	66
Gambar 0.13 Masterplan Kawasan Danau Tempe, 2016	67
Gambar 0.14 Masterplan Kawasan Danau Tempe, 2016	67
Gambar 0.15 Kawasan Kumuh Menurut Kementerian PUPR, 2016	113

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif...	17
Tabel 0.2 Evaluasi Keputusan Teoritis...	24
Tabel 0.3 Susunan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	76
Tabel 04 Strategi Penyelamatan Danau Tempe	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan *support system* terbesar dalam kehidupan manusia. SDA tidak hanya membantu kelangsungan hidup manusia secara biologis, yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga menyokong pengelolaan negara dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial – budaya, dan politik. Manusia harus bertahan hidup untuk mengurus masalah negara, energi untuk melakukan semua hal itu, hanya bisa diperoleh melalui SDA. SDM tidak akan mengalami peningkatan kualitas tanpa adanya SDA, begitupun sebaliknya, kelestarian SDA dapat tercipta melalui peran serta manusia.

Paradigma lingkungan dalam pengelolaan SDA di Indonesia bersifat antroposentrik. Hal tersebut dapat ditinjau di dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3, yakni,“... bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹

Pada pasal tersebut, negara dan rakyat adalah subjek hukum, sedangkan SDA hanyalah objek hukum. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya pada bidang lingkungan menjadi akar permasalahan terjadinya eksploitasi SDA, oleh karenanya negara tidak memberikan hak

¹ Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3

konstitusional pada alam untuk dibatasi pemanfaatannya. Hasrat manusia menguasai SDA telah terlegitimasi dalam berbagai aturan atau kebijakan, sehingga problematika pengelolaan SDA, tidak hanya berkutat pada persoalan monopoli penguasaan SDA oleh kapitalis atau oknum pemerintah yang berkepentingan, melainkan sesuatu yang lebih prinsipil, yaitu relasi antara alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Data kerusakan lingkungan dan berbagai bentuk eksploitasi SDA terbilang sulit terhimpun. Melalui penelusuran via daring, hampir tak ditemukan data terbaru versi pemerintah mengenai kerusakan SDA. Walaupun begitu, beberapa bencana alam yang terjadi seperti gempa, likuifaksi, tanah longsor, banjir, dan lain – lain cukup membuktikan bahwa manusia dan alam lingkungan tidak lagi harmonis, semestinya pemerintah turut andil melakukan upaya preventif dengan menegakkan hukum di bidang pengelolaan SDA, agar tercipta keseimbangan ekologi.

Sistem hukum Indonesia belum memberikan hak secara konstitusional pada SDA sebagai subjek hukum. SDA masih bergantung pada kepentingan manusia dalam peraturan perundang – undangan, sebagaimana pemahaman yang sangat antroposentrik, meletakkan segala sesuatunya demi kemaslahatan manusia. Kritik terhadap paradigma antroposentrik menempatkannya sebagai akar masalah kerusakan SDA, pemenuhan hasrat kepemilikan manusia mengobjektifikasi SDA menjadi sebuah komoditi. Solusi dan resolusi terbaik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, yakni pemerintah harus mempertegas batas-

batas penggunaan SDA dalam pembangunan dengan paramater yang jelas, pemerintah sudah saatnya melakukan edukasi hidup minimalis kepada masyarakat, demi tertibnya pemanfaatan SDA.

Danau Tempe adalah satu diantara banyaknya kekayaan SDA di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian oleh Pusat Penelitian Limnologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danau Tempe dikategorikan tidak sehat, disebabkan adanya masalah sedimentasi akibat alih fungsi hutan di daerah hulu. Dampak beruntun yang terjadi karena perilaku manusia yang buruk dan tidak berdasarkan pertimbangan matang dalam alih fungsi lahan, bukan hanya merusak ekosistem Danau Tempe, melainkan juga menyebabkan distraksi ekonomi, sosial, dan budaya di dalam masyarakat pesisir Danau Tempe. Kerusakan ekosistem yang terjadi di danau tersebut terbukti sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, seperti rendahnya pendapat akibat dari berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Masalah lain yang turut berpengaruh signifikan yaitu, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, perubahan jenis ikan, dan konflik antarnelayan sebagai dampak komersialisasi wilayah tangkap ikan.

Pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai revitalisasi Danau Tempe seluas 13.000 hektar, tujuan dari kebijakan tersebut yaitu, “ mengatasi pendangkalan akibat masifnya pertumbuhan eceng gondong, sedimentasi, dan okupasi lahan.

Proyek ini dilakukan bersama KSO PT Nindya dan FAF, adapun anggaran yang digunakan dalam pengerjaannya yaitu sebesar 283.98 miliar².

Berdasarkan hasil penelusuran melalui media online, program revitalisasi tersebut direncanakan berakhir pada tahun 2019. Melalui hasil pengamatan yang didukung oleh berbagai informasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam wujud Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, demi terciptanya kebijakan yang tepat sasaran.

Evaluasi kebijakan sebagai bagian dari tahap analisis kebijakan publik, memiliki peran penting dalam keberlanjutan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn, evaluasi berhubungan erat dengan skala nilai terhadap manfaat dari hasil kebijakan dan program. Lebih lanjut, William N. Dunn mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi evaluasi.

” Pertama, mengungkap tingkat pencapaian tujuan kebijakan (kinerja). Kedua, menguji alternatif sumber nilai. Ketiga, mengaplikasikan metode – metode analisis kebijakan sekaligus membantu redefinisi alternatif kebijakan pada perumusan lanjutan”

Mengacu pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, langkah evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe, harus memenuhi kriteria penilaian kebijakan diantaranya, menyoal efektivitas, efisiensi, kecukupan,

² PUPR, *Revitalisasi Danau Tempe*, <https://simantu.pu.go.id/>, Jakarta, PUPR, 2012, diakses pada 22 Maret 2021, pukul 23.00 WITA

perataan, responsivitas, dan ketepatan.³ Efektivitas melingkupi informasi terkait hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kebijakan. Efisiensi menunjukkan usaha yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kebijakan, kecukupan menyangkut pengaruh hasil kebijakan terhadap masalah yang terjadi, berikutnya perataan yang dimaksudkan adalah penyebarluasan manfaat kebijakan pada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, selanjutnya mengenai responsivitas, terkait pemenuhan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok bersangkutan. Sedangkan ketepatan dianggap sebagai nilai kegunaan kebijakan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang didukung berbagai informasi evaluasi kebijakan pengelolaan Danau Tempe diperhadapkan pada fenomena yang dapat diidentifikasi yaitu :

- 1) Hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe.
- 2) Pengaruh hasil kebijakan pengelolaan Danau Tempe terhadap ekosistem Danau Tempe dan kehidupan masyarakat pesisir.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam konteks perubahan kebijakan pengelolaan Danau Tempe

³ Eko Handoyo, Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Penerbit, "Widya Karya" : Semarang, 2012, hlm 139

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana hasil kebijakan pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo dalam kerangka *pentahelix*?
- 2) Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk menganalisis secara kritis kebijakan pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo dalam kerangka *pentahelix*.
- 2) Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai referensi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.
- 2) Secara praktis, diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah dalam mengeluarkan dan menjalankan kebijakan pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo.
- 3) Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat

dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang kebijakan pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan Publik dalam pandangan Thomas R. Dye merupakan pilihan pemerintah terkait sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.⁴ Kebijakan lahir dari pengambilan keputusan oleh pemerintah sesuai dengan hasil analisis masalah kontekstual ataupun amanat konstitusi. Kebijakan publik seyogyanya menjadi solusi sekaligus resolusi dalam rangka penanganan masalah publik. Meski demikian, kebijakan publik sering mengalami kendala – kendala secara administratif maupun politik akibat adanya berbagai kepentingan oknum/aktor kebijakan. Kondisi tersebut menjadi faktor urgensi dalam analisis kebijakan publik, tidak hanya menyoal proses kebijakan, melainkan juga untuk membongkar sisi lain di balik suatu kebijakan, meninjau keberpihakan kebijakan tersebut, sehingga terbebas dari modus ‘kejahatan sistemik’ oleh *stakeholder*.

Kebijakan Publik merupakan upaya pencapaian tujuan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam urusan pemerintahan.⁵ Menurut Hoogerwerf, tujuan dari adanya kebijakan yaitu, memelihara ketertiban umum, melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal yang dikoordinir oleh Negara, dan menentukan alokasi materi. Secara

⁴ Uddin B Sore dan Sabirin, *Kebijakan Publik*, Makassar : CV Sah Media, 2017

⁵ A Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan dalam Ali, Faried, Pengantar Analisis Kebijakan, Bifad Library : Makassar, 2011

keseluruhan, pemerintah dalam proses kebijakan mengarahkan *public interest* sebagai prioritas.

James E. Anderson berpendapat bahwa tujuan dari sebuah kebijakan yaitu adanya pemecahan masalah. Kebijakan diharapkan mampu mengatasi masalah – masalah sosial kemasyarakatan. Anderson menilai kebijakan (*policy*) berbeda dengan keputusan (*decision*)⁶. Sedangkan menurut David Easton, kebijakan adalah konseptualisasi hasil identifikasi masalah⁷. Adapun unsur - unsur kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yaitu adanya pernyataan kehendak, pernyataan didasarkan otoritas, adanya kewenangan, dan adanya tujuan kehendak.

2.2 Analisis Kebijakan Publik

Terdapat banyak ilmuwan yang mendefinisikan kebijakan, seperti Eystone merumuskan kebijakan sebagai hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya (*the relationship of governmental unit to its environment*).⁸ Selanjutnya Wilson berpandangan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan mengenai masalah – masalah tertentu, langkah – langkah yang telah/sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan – penjelasan yang diberikan oleh merek

⁶ [https://eprints.uny.ac.id/8530/3/\[pBAB%20%20-%2007401241045.pdf](https://eprints.uny.ac.id/8530/3/[pBAB%20%20-%2007401241045.pdf) diakses pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 13.49 WITA

⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 13.56 WITA

⁸ Prof,Dr,H Abdul Solichin ,MA, Analisis Kebijakan Publik. Bumi Aksara : Jakarta, 2012

mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi (*The action, objectives, and pronouncements of governments of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*).⁹

Selanjutnya pendapat W.I Jenkins, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (*A set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within specified situation where the decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*).¹⁰

Kemudian, Lemieux juga berpandangan bahwa kebijakan ialah produk aktivitas – aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah – masalah public yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor – aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu (*The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time*).¹¹

⁹ ibid

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

Analisis kebijakan merupakan proses kreativitas pengetahuan, meninjau sebab, akibat, dan kinerja kebijakan¹². Metodologi analisis kebijakan bersifat deskriptif yaitu mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan – kebijakan publik. Selanjutnya normatif, menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan, nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Kemudian yang terakhir adalah valuatif yakni pemilihan terhadap nilai – nilai yang saling bersaing (teknis, moral, dan etika).¹³ Tiga sifat secara metodologis tersebut menjadi indikator dalam melihat proses analisis kebijakan sekaligus memberi acuan yang jelas terhadap konten analisis.

Metodologi analisis kebijakan berupa kajian multidisipliner, perpaduan antara Ilmu Politik, Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, dan Filsafat.¹⁴ Kompleksitas masalah kebijakan yang tidak bisa terjawab dalam kajian positivistik kemudian secara metodologis terjawab dalam pendekatan multiplisme kritis. Multiplisme kritis adalah prosedur pengembangan analisis kebijakan yang telah melalui evolusi, menyesuaikan dengan pengalaman berbagai riset kebijakan. Multiplisme kritis menunjukkan bahwa plausibilitas induktif dan relevansi kebijakan adalah standar utama pengkajian kebijakan. Multiplisme kritis bertautan langsung dengan beberapa bidang analisis kebijakan publik , diantaranya :

¹²William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University : Yogyakarta, 2003

¹³ A.M Rusli, *Presentasi Analisis Kebijakan Publik*, diakses pada pukul 13.38 WITA, 28 April 2021

¹⁴ibid

1) Operasionisme berganda

Melakukan perbandingan dua hal secara serempak berdasarkan besaran biaya proses dan manfaat yang dihasilkan.

2) Penelitian Multimetode

Menggunakan pendekatan kualitatif dan zkuantitatif secara bersamaan. Mengintegrasikan dua metode untuk menghindari pakem.

3) Sintesis Analisis Berganda

Meninjau pengaruh kebijakan terhadap populasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek pengetahuan untuk menghindari adanya analisis tunggal otoritatif dalam kebijakan.

4) Analisis Multivariat

Memasukkan berbagai variabel untuk menguji kesesuaian kebijakan dengan konteks masalah dan memberi perbandingan teori.

5) Analisis Pelaku Berganda

Fokus pada individu – individu dan kelompok yang terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan.

6) Analisis Perspektif Berganda

Perhatian utama terhadap aktor kebijakan, analisis menggunakan tinjauan akademis dalam perspektif etis, politis, ekonomis, sosial, *cultural*, psikologis, dan teknologis.

7) Komunikasi Multimedia

Memfaatkan teknologi informasi untuk menelusuri relevansi kebijakan, pemilihan media interaktif adalah ciri utamanya, agar efektifitas informasi dan efisiensi operasional dapat terjaga.

Adapun prosedur analisis kebijakan adalah sebagai berikut :

1) Defenisi (perumusan masalah)

Informasi mengenai kondisi – kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

2) Prediksi (peramalan)

Informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.

3) Preskripsi (rekomendasi)

Informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

4) Deskripsi (pemantauan)

Informasi konsekuensi di masa sekarang dan masa lalu dari terapan alternatif kebijakan.

5) Evaluasi

Informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah.¹⁵

¹⁵ ibid

2.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sebagai prosedur untuk menilai atau menyimpulkan hasil kebijakan. Inti pengamatan dalam hal ini yaitu, klarifikasi dan kritik terhadap teknis kebijakan. Pada proses analisis umum, evaluasi menghasilkan informasi nilai yang berlangsung di masa lalu dan masa mendatang. Menurut Alkin, terdapat tiga hal pokok dalam evaluasi yaitu, metode (*method*), penilaian (*valuing*) dan kegunaan (*use*). Tiga hal tersebut berakar dari *epistemology, social inquiry, social accountability*.¹⁶

Metode (*method*) bertujuan untuk memudahkan analisis melakukan proses pengkajian kebijakan. Pendekatan penelitian yang sistematis akan membantu penemuan ragam masalah kebijakan. Penilaian (*valuating*) sebagai rangkaian evaluasi dibagi atas dua jenis yakni objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas menuntut peran utama dari seorang analis dalam memberi nilai terhadap suatu kebijakan, sedangkan subjektivitas menganut paham yang lebih relatif menilai realitas yang dinamis. Kegunaan (*use*), paling tidak bagian ini wajib menjawab pertanyaan, bagaimana cara memperoleh informasi? Dimana informasi digunakan? Siapa yang menggunakan informasi?. Tiga cabang teori evaluasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tidak berdiri sendiri secara fungsional.

P. Lester dan Josep Stewart mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat sebab kegagalan dan mengukur dampak

¹⁶ Mami Hajaroh, *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program*, Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta

yang dihasilkan suatu kebijakan, sesuai dengan perencanaan.¹⁷ Pendapat lain dari Rossi dan Freeman menyoal evaluasi sebuah program harus menjawab pertanyaan penelitian seperti desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas), dan kegunaan program (dampak dan efisiensi). Kemudian terpenuhinya kriteria dan tujuan juga termasuk di dalam konten analisis evaluasi.¹⁸

William N. Dunn membagi atas empat bagian karakteristik evaluasi kebijakan, diantaranya:

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.¹⁹

2. Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan pra syarat bagi evaluasi.²⁰

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.²¹

4. Dualitas nilai

¹⁷ <http://eprints.uny.ac.id/18954/4/BAB%20%20%2809417144044%29.pdf> diakses pada 11 Juli 2021, pukul 14.17 WITA

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Loc.cit

²¹ Loc.cit

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.²²

Selanjutnya, William N. Dunn membagi atas tiga tipe pendekatan evaluasi kebijakan yaitu²³ :

1) Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menemukan informasi terpercaya terkait hasil kebijakan. Tipe ini tidak memprioritaskan nilai manfaat dari sebuah kebijakan, dengan anggapan bahwa nilai kebijakan selalu *self evident*.²⁴

2) Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pendekatan ini juga menggunakan metode deskriptif untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai hasil kebijakan. Evaluasi didasarkan pada tujuan program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Tipe ini menggunakan undang – undang, dokumen – dokumen program, dan hasil wawancara. Pada jenis evaluasi ini, terdapat sub tipe evaluasi, yakni evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif merupakan upaya penilaian pencapaian tujuan dan target formal kebijakan. Sedangkan evaluasi

²² Loc.cit

²³ Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University

²⁴ ibid

formatif adalah peninjauan tingkat lanjut aktivitas kebijakan bahkan setelah pencapaian tujuan dan target.²⁵

Tabel 0.1

Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif

KONTROL TERHADAP AKSI KEBIJAKAN	ORIENTASI TERHADAP PROSES KEBIJAKAN	
	Formatif	Sumatif
Langsung	Evaluasi	Evaluasi
Tidak	perkembangan	eksperimental
Langsung	Evaluasi	Evaluasi Hasil
	proses retrospektif	retrospektif

Evaluasi perkembangan berfungsi memunculkan hasil evaluasi eksplisit, melibatkan peserta program untuk mengetahui kecenderungan yang diharapkan, sehingga aksi kebijakan terkontrol. Evaluasi proses retrospektif bertujuan melakukan pemantauan kebijakan, mengelola hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan. Evaluasi eksperimental adalah jenis metode yang mengontrol langsung relevansi variable – variable untuk dijadikan masukan kebijakan. Adapun evaluasi hasil

²⁵ ibid

retrospektif, melakukan kontrol tidak langsung melalui pendekatan kuantitatif, studi longitudinal (evaluasi perubahan hasil program dari masa ke masa) dan studi lintas (evaluasi perbandingan signifikan Tindakan – Tindakan atau kejadian – kejadian pada waktu tertentu).²⁶

3) Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision – Theoretic – Evaluation*)

Jenis evaluasi ini berusaha menutupi kelemahan evaluasi semu dan evaluasi formal dengan cara menghubungkan informasi kebijakan. Bentuk utama jenis evaluasi ini yaitu penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut. Penaksiran evaluabilitas (*evaluability assessment*) sebagai prosedur analisis pembuatan keputusan untuk memperjelas tujuan, sasaran, dan asumsi kinerja kebijakan. Berikut adalah indikator analisisnya, spesifikasi program kebijakan, koleksi informasi program kebijakan, *modelling* program kebijakan, penaksiran evaluabilitas program kebijakan, dan umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakai.²⁷ Analisis utilitas multiatribut mengarah pada penilaian subjektif pelaku kebijakan. Tahap – tahap jenis analisis ini yaitu, pertama identifikasi pelaku. Kedua, spesifikasi isu. Ketiga, spesifikasi hasil kebijakan. Keempat, identifikasi atribut hasil. Kelima, penyusunan jenjang nilai atribut. Keenam, penyusunan skala atribut. Ketujuh, standarisasi skala. Kedelapan, pengukuran

²⁶ ibid

²⁷ ibid

hasil. Kesembilan, kalkulasi utilitas. Kesepuluh, evaluasi presentasi.²⁸

2.4 Paradigma Kritis

Paradigma berasal dari bahasa Latin yaitu, *para* (di samping, di sebelah), *deigma* (memperlihatkan model, contoh, arkatipe, atau bentuk ideal). Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah cara melihat realitas dunia yang dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, sehingga menghasilkan *mode of knowing*, sedangkan menurut George Ritzer, paradigma merupakan dasar pemikiran yang digunakan oleh ilmuwan untuk mempelajari sebuah pengetahuan tertentu.

Paradigma dalam Ilmu- Ilmu Sosial dapat dibagi atas tiga bagian yaitu, struktural fungsional, interaksionis simbolik, dan konflik. Pertama, struktural fungsional sebagai paradigma klasik yang bersifat positivistik, menekankan pada hakikat realitas, mempercayai bahwa realitas diatur oleh kaidah atau hukum universal. Paradigma ini memposisikan peneliti harus objektif melalui proses jaga jarak dengan objek penelitiannya atau hanya bertindak sebagai pengamat. Metode penelitian dalam paradigma ini yaitu model kuantitatif, menghadirkan hipotesis dan mengurai masalah secara deduktif.²⁹

²⁸ ibid

²⁹ PUPR, 2018, *Revitalisasi Danau Tempe*, <https://simantu.pu.go.id/>, diakses pada 22 Maret 2021, pukul 23.00 WITA

Kedua, interaksionis simbolik. Paradigma ini disebut juga paradigma interpretatif yang bersifat konstruktivis. Menurut pandangan ini, kebenaran bersifat relatif, realitas sosial bergantung pada individu sebagai pelaku yang menghasilkan tindakan sosial. Subjektivitas menjadi faktor penentu dalam penelitian, interaksi antara subjek merupakan upaya pencapaian kebenaran. Peneliti memiliki kedekatan dengan subjek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam paradigma ini yaitu kualitatif, menggali informasi mendalam melalui intensitas dialektis.³⁰

Ketiga, konflik. Paradigma konflik atau dikenal dengan istilah paradigma kritis, memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang semu karena merupakan hasil kontaminasi sistem politik yang dikemas dalam sejarah. Peneliti yang menggunakan paradigma ini berdasar pada nilai – nilai tertentu yang diyakini. Peneliti sebagai *transformative intellectual* dalam pembongkaran masalah, artinya peneliti turut terlibat sebagai partisipan. Paradigma ini menggunakan *mixed method* untuk menemukan kebenaran dari realitas sosial.³¹

Paradigma kritis muncul sebagai rekonstruksi pemikiran Karl Marx. Selain fokus pada kritik terhadap teori Marxian, pemikir aliran ini juga melakukan kritik terhadap positivisme, Sosiologi, masyarakat modern, dan kultur. Pembaruan pemikiran Karl Marx didasarkan pada fenomena determinisme ekonomi. Konsentrasi Marxian di bidang ekonomi dinilai keliru, sehingga neo-Marxis berusaha mengungkapkan permasalahan yang

³⁰ ibid

³¹ ibid

berkaitan dengan aspek sosial lain untuk mendorong keseimbangan. Aliran kritis memusatkan perhatian pada aktivitas manusia secara alamiah yang berpengaruh terhadap struktur sosialnya.

2.5 Konsep *Penta Helix*

Penta helix diperkenalkan oleh Henry Etzkowitz sebagai sebuah model relasi lima elemen seperti pemerintah, swasta, media, akademisi, dan komunitas/masyarakat. Tujuan dari konsep ini yaitu mendorong *entrepreneur* untuk memperoleh *profit, people, planet, and sustainably*. Pada konteks kebijakan di Indonesia, *penta helix* sering digunakan pada sektor wisata, pelibatan beberapa *stakeholder* yang relevan dianggap efektif untuk meningkatkan nilai komersialisasi.

Masing-masing elemen dalam *stakeholder* berkedudukan sebagai kelompok kepentingan. Afiliasi didasari adanya hubungan kepentingan ekonomi yang terakomodir secara politis. Kebijakan dengan format *penta helix* memperlihatkan secara jelas, masing – masing kelompok kepentingan, memiliki sesuatu yang bisa ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan yang memberi legitimasi kepada swasta, agar dapat memasukkan layanan dan jasanya, swasta membutuhkan peran akademisi untuk meningkatkan kualitas layanan dan jasa melalui inovasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, swasta juga mengoptimalkan fungsi media dalam melakukan publikasi dan promosi ke khalayak. Semua itu memberi *feedback*.

2.6 Dasar Hukum Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe merupakan dasar hukum untuk mengambil langkah strategis dalam rangka mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi – fungsi danau sebagai penyangga kehidupan untuk masa kini dan masa mendatang, sesuai yang termaktub di dalam ketentuan umum Perda tersebut.

Perencanaan pengelolaan Danau Tempe terbagi atas tiga bagian yakni, rencana tata ruang, rencana induk pengelolaan danau, dan rencana aksi pengelolaan danau. Selanjutnya termuat maksud dari pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan diantara, pemanfaatan wadiah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian, irigasi pertanian, air baku PDAM dan kegiatan lain yang ramah lingkungan.

Pemanfaatan perikanan dilakukan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya, sedangkan untuk pemanfaatan wisata dilakukan Festival Danau Tempe, agrowisata, rumah terapung dan industri wisata yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal. Selanjutnya pemanfaatan transportasi bertujuan untuk memudahkan perpindahan manusia, barang atau hewan dll. ke tempat lain guna peningkatan kualitas hidup. Adapun mengenai pemanfaatan penelitian ilmiah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab kebutuhan praktis. Penelitian yang dibenarkan adalah tidak mengganggu aktivitas masyarakat

dan mendapatkan izin penelitian. Pemanfaatan irigasi pertanian berupa pompanisasi untuk membantu aktivitas pertanian masyarakat pesisir Danau Tempe saat air surut dan ketika air pasang, membantu masyarakat petani di luar wilayah pesisir Danau Tempe. Selain itu, Danau Tempe menjadi sumber air baku PDAM.

Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 yaitu melaksanakan regulasi, pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem danau. Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan, dan wadiah air danau.

Berikutnya mengenai pengaturan pemeliharaan danau bertujuan melestarikan daya dukung danau agar fungsi danau tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bentuk perlindungannya terhadap air dan tanah, sempadan danau, ekosistem danau, dan upaya mencegah terjadinya pencemaran dan okupasi.

Hal lain yang belum terjabarkan dalam narasi ini namun termuat di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe diantaranya ruang lingkup, zonasi danau, wewenang, koordinasi, pelaksanaan usaha, pendanaan, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat, termasuk pula persoalan pengawasan, penyelesaian sengketa, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

2.7 Kerangka Konseptual

Pengelolaan Danau Tempe diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016. Pada penjelasan Perda tersebut, termuat informasi mengenai adanya permasalahan lingkungan yang terjadi di perairan Danau Tempe dan ekosistem di luar wilayah danau, penanganan masalah ini melibatkan beberapa instansi. Penelitian ini berusaha meninjau kebijakan pengelolaan Danau Tempe dalam kerangka *penta helix*, menemukan faktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan.

Berdasarkan judul yang diangkat yaitu, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo", maka kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu mengikuti tipe pendekatan evaluasi kebijakan publik menurut William N Dunn khususnya **pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis**, yaitu :

Tabel 0.2

Evaluasi Keputusan Teoritis

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk – Bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	Eksperimen sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk – Bentuk Utama
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut

Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis menggunakan Teknik *brainstorming*, analisis argumentasi, delphi kebijakan, dan analisis survei pemakai. Agar penelitian ini lebih komprehensif, maka paradigma yang digunakan untuk membedah konten kebijakan yaitu teori kritis menurut Jurgen Habermas. Habermas melihat realitas terbentuk atas kepentingan, dunia-hidup, argumentasi, rasionalitas, dan kolonisasi dunia hidup. Kepentingan yang dimaksudkan yaitu kepentingan analisis-empiris (hasrat untuk menguasai fisik dan sosial), kepentingan hermeneutis-historis (hasrat mendalami keunikan manusia), dan kepentingan emansipatoris-kritis

(hasrat menelusuri dan mengungkap sebab – akibat proses manusia yang dianggap terkondisikan secara sosial dan historis). Adapun model komponen analisis aktor kebijakan dalam penelitian ini akan mengadopsi strategi *penta helix* menurut Henry Etzkowitz. Setiap aktor kebijakan tentu memiliki kepentingan masing-masing, format *penta helix* memudahkan kita mengidentifikasi hubungan antar-*stakeholder* yang saling mempengaruhi.

Point of statement :

William N Dunn berpandangan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap capaian kebijakan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Kata kunci : Nilai Manfaat.

Jurgen Habermas berpandangan bahwa terdapat tiga kepentingan manusia yaitu, teknis, praktis, dan emansipatoris yang hasil akhirnya adalah kontrol terhadap alam, pemahaman tentang orang lain, dan kebebasan dari struktur dominasi.

Kata kunci : Kepentingan

Henry Etzkowitz berpandangan bahwa kolaborasi antara *stakeholder* yang mempunyai relevansi kepentingan akan memberi dampak signifikan pada peningkatan usaha.

Kata Kunci : Kolaborasi

Gambar 0.1 Kerangka Konseptual

